

Judul : Cegah peredaran narkoba, senayan dorong reformasi lapas
Tanggal : Minggu, 12 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Peredaran Narkoba

Senayan Dorong Reformasi Lapas

ANGGOTA Komisi XIII DPR Ahmad Iman Sukri menilai, sistem keamanan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lemah. Banyak kasus peredaran narkoba diduga dilakukan di dalam bilik penjara. Padahal, lapas harusnya jadi tempat pembinaan, bukan sarang peredaran narkoba.

Menurut Iman, peredaran narkoba di dalam lapas masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan. Pemerintah, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemeninipas) perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keamanan lapas.

"Pengawasan berbasis teknologi dan evaluasi sistem kontrol internal sangat mendesak. Selain itu, integritas petugas harus ditingkatkan agar lapas tidak terus kecolongan," kata Iman dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

Anggota Fraksi PKB itu menilai, perlu audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan petugas lapas. Jangan sungkan memberikan hukuman berat jika ada yang terbukti kongkalikong dengan jaringan narkoba. Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penangkapan di luar lapas.

"Lapas harus benar-benar bersih dari praktik haram agar proses pembinaan berjalan efektif. Penegakan hukum harus simultan di dalam dan luar lapas," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Yumnar Arif Wibowo menambahkan, ada persoalan sistemik di lapas. Peredaran narkoba di lapas hanya puncak gunung es dari praktik serupa yang belum terungkap. Ini sangat memprihatinkan dan menciderai kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Legislator Fraksi PKS tersebut menekankan agar praktik jaringan narkoba yang melibatkan narapidana, oknum petugas, dan pihak luar diberantas tuntas. Penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Semua pengkhianat yang memfasilitasi kejahatan dari balik jeruji harus diproses tanpa kompromi.

Dia mendorong reformasi total lapas agar tidak lagi menjadi sarang praktik ilegal. Reformasi mencakup sistem manajemen, pengawasan, integritas petugas, hingga pembinaan warga binaan. Pembinaan dan pengawasan harus berjalan seiring.

"Kita tidak bisa lagi hanya reaktif pada kasus-kasus yang muncul. Lapas harus direformasi secara fundamental, baik dari



Ahmad Iman Sukri

sisi sistem, SDM, maupun tata kelola," tambahnya.

Senada, anggota Komisi III DPR Hasbially Ilyas mempertanyakan bagaimana narapidana bisa leluasa menggunakan aplikasi untuk berbisnis narkoba di lapas. Perlu pengawasan yang lebih ketat agar peredaran narkoba dapat ditekan.

"Ya tentu saja kasus ini harus diurus tuntas. Kok bisa napi di lapas leluasa menggunakan aplikasi untuk berbisnis narkoba di dalam lapas," kata Hasbially.

Politikus PKB itu menyoroti penggunaan ponsel di dalam lapas. Menurutnya, pengawasan lapas saat ini sudah cukup ketat, tapi per-

lu ditingkatkan lagi dengan CCTV. Selain itu, integritas petugas menjadi kunci menutup peluang kerja sama ilegal dengan napi.

"Selama petugas lapas mampu menjaga integritasnya dengan baik, maka kasus semacam ini dapat ditekan seminimal mungkin," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyoroti penggunaan aplikasi perpesanan yang digunakan dalam kasus ini. Dia menilai, ini jadi peringatan serius terkait potensi penyalahgunaan teknologi komunikasi yang sulit dilacak aparat. Pengawasan digital harus diperkuat agar celah seperti ini tertutup.

Legislator dari Partai Golkar itu mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menelusuri pola penggunaan aplikasi tersebut di Indonesia. Hal ini termasuk menilai tingkat enkripsi dan potensi penyalahgunaannya untuk aktivitas ilegal.

"Pemblokiran atau pembatasan akses bisa dipertimbangkan jika terbukti digunakan secara sistematis untuk kejahatan," tegasnya.

Selain itu, Komdigi diharapkan memperkuat sistem deteksi dini terhadap aplikasi berisiko tinggi. Koordinasi dengan aparat

penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan juga menjadi prioritas. Teknologi harus menjadi alat memperkuat tata kelola, bukan celah untuk kejahatan.

"Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat tata kelola, bukan celah untuk kejahatan," ucapnya.

Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemeninipas Rika Aprianti mengungkapkan, aksi artis AZ terbongkar saat Kepala Rutan Salemba melakukan inspeksi mendadak. Petugas menemukan barang terlarang dari tangan AZ dan langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

Dia menegaskan, lapas menerapkan *zero tolerance* terhadap pelanggaran.

"Siapa pun yang terbukti terlibat akan diberi sanksi dan hukuman sesuai peraturan yang berlaku," tegas Rika.

Diketahui, AZ kepergok mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dia menjalankan aksinya bersama lima orang lainnya. Barang haram diperoleh dari pihak di luar Rutan. AZ saat ini tengah menjalani hukuman empat tahun penjara terkait kasus narkoba sebelumnya. ■ **PYB**